

LOKAKARYA
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT LPM IPB
DAN PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KERJASAMA
BOGOR, 13-14 JANUARI 1993

LOK-PPM.IIIA

KEBIJAKSANAAN PERMBANGUNAN PERTANIAN
DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Oleh :

BAPPEDA DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA



LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1993

KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI DKI JAKARTA¹⁾

Oleh:

Drs. Utomo Sarwan²⁾
Ir. Tias³⁾

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan dari suatu keadaan ke arah yang lebih baik, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai suatu proses perubahan dan pertumbuhan untuk mencapai tujuan di atas, maka hakekat pembangunan di Indonesia bertitik sentral pada manusia dan masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan dengan seluruh aspek kehidupannya.

Pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional memegang peranan yang sangat penting dalam menyumbangkan pertumbuhan ekonomi nasional. DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan metropolitan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan regional. Pada periode 1980-1990 pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta meningkat rata-rata 8,23 persen per tahun yang berarti lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama yaitu 5,90 persen per tahun (lihat Tabel 1).

-
- 1) Makalah disampaikan pada Lokakarya Pengabdian Pada Masyarakat LPM IPB dan Penyusunan Program Kegiatan dengan Pemerintah Daerah Kerjasama, di LPM IPB Bogor tanggal 13-14 Januari 1993.
 - 2) Kepala Bidang Ekonomi, Bappeda Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - 3) Staf Bappeda DKI Jakarta.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 1980-1990 (%)

Tahun	Laju Pertumbuhan (%)	
	DKI Jakarta	Nasional
1980	9,26	9,88
1981	17,39	7,93
1982	4,73	2,25
1983	8,24	4,19
1984	10,26	6,98
1985	5,15	2,46
1986	5,01	5,87
1987	5,85	4,93
1988	6,61	5,73
1989	9,74	7,39
1990	8,70	7,34
Rata-rata	8,26	5,90

Sumber : Rencana Umum Pembangunan Ekonomi (RUPE) DKI Jakarta 1992

Tingginya pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta merupakan hal yang wajar mengingat kedudukan kota Jakarta adalah spesifik dan mempunyai berbagai posisi penting. Terdapat tiga posisi penting yaitu :

1. Jakarta sebagai metropolis yang sangat strategis

Jakarta yang jumlah penduduknya sekitar 9 juta jiwa telah mempunyai predikat sebagai kota metropolitan. Dalam posisi ini Jakarta merupakan konsentrasi kegiatan masyarakat, terutama ekonomi dan sosial budaya. Salah satu indikatornya yaitu uang yang beredar di Jakarta sekitar 70-80 persen dari total peredaran uang di Indonesia. Secara singkat Jakarta diharapkan memegang leading position, baik domestik, regional, internasional bahkan global.

2. Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia

Dalam posisi ini Jakarta diatur secara khusus sebagai ibukota, Jakarta merupakan sistem politik/pemerintahan dan perwujudan citra negara dan bangsa Indonesia di mata dunia. Landasan pasal 6 UU no.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah : Ibukota negara Republik Indonesia Jakarta, mengingat pertumbuhan dan perkembangannya dapat mempunyai dalam wilayahnya susunan pemerintahan dalam bentuk lain yang sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang."

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka lahir-lah Undang-undang no.11 tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

3. Jakarta sebagai Provinsi/Daerah Tingkat I

Dalam posisi ini Jakarta merupakan badan hukum publik yang memiliki otonomi dalam mengatur, mengurus dan mengontrol rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak seperti Dati I lainnya, DKI Jakarta sampai saat ini tidak mempunyai Dati II.

Dilihat dari posisi di atas Jakarta memikul tanggung jawab yang besar dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia di tengah proses globalisasi ekonomi dan arus informasi secepat pada umumnya, serta tanggung jawab yang besar pula terhadap setiap warganya sendiri. Aktivitas Jakarta, gaungnya tidak terbatas hanya di lingkungan kota Jakarta atau Jabotabek, melainkan menjangkau seluruh Indonesia dan dunia.

Dengan demikian mengingat beratnya beban dan tanggung jawab yang harus dipikul maka kota Jakarta mempunyai segudang permasalahan yang pemecahannya pun memerlukan integritas yang sangat tinggi baik dari segi program, serta kualitas sumber daya manusia.

Masalah di bidang ekonomi DKI Jakarta yang harus dipecahkan diantaranya adalah masalah kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan. Sebagian masyarakat belum siap menghadapi perubahan sosial yang begitu pesat oleh karena itu mereka tidak mampu atau tidak dapat menggunakan peluang yang tersedia atau tidak mampu menciptakan peluang sendiri, sehingga angka pengangguran semakin meningkat (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Angkatan kerja dan pengangguran DKI Jakarta

Tahun	Angk.Kerja (org)	TPAK (%)	Pengangguran (%)
1980	2.004.478	42,72	3,85
1985	2.538.847	42,56	5,65
1990	3.157.639	48,70	7,15

Sumber : Rencana Umum Pembangunan Ekonomi (RUPE) DKI Jakarta 1992

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dibarengi dengan pengurangan penduduk miskin akan lebih berarti lagi apabila diikuti dengan pemerataan pendapatan. Di Indonesia aspek pemerataan telah mendapatkan prioritas pertama sejak awal Pelita III. Masalah pemerataan pendapatan menjadi lebih penting karena tujuan pembangunan tidak hanya pendapatan perkapita dari penduduknya namun juga penurunan kesenjangan pendapatan antar golongan masyarakat. Perhatian utama dari konsep pemerataan adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau yang sering dikenal sebagai kelompok masyarakat miskin. Untuk mengukur pemerataan maka ukuran yang digunakan adalah menurut kriteria Bank Dunia yaitu dengan membagi penduduk atas tiga kelompok yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen berpendapatan menengah serta 20 persen berpendapatan tinggi. Selain itu pemerataan pendapatan dapat diukur pula melalui koefisien Gini Ratio.

Di Tabel 3 menggambarkan pendapatan yang diterima penduduk yang berpendapatan rendah menunjukkan ketidakmerataan rendah sedangkan untuk koefisien gini selama kurun 1984-1990 terlihat adanya peningkatan koefisien gini walaupun relatif kecil. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi ketidakmerataan pembagian yang semakin lama semakin besar meskipun koefisien gini selama kurun tersebut masih tergolong rendah.

Tabel 3. Pola Pembagian Pengeluaran dan Gini Rasio DKI Jakarta 1984-1990

Tahun	40% rendah (%)	40% menengah (%)	20% tinggi (%)	Gini Rasio
1984	22,98	38,00	39,02	0,2935
1987	22,89	36,65	40,46	0,2938
1990	22,56	36,65	40,62	0,3045

Sumber : Rencana Umum Pembangunan Ekonomi (RUPE) DKI Jakarta 1992

Di DKI Jakarta batas pengeluaran minimum bagi seseorang untuk dikategorikan miskin adalah Rp.15.775 pada tahun 1984, Rp.22.440 tahun 1987 dan Rp.29.746 pada tahun 1990. Jumlah dan prosentase penduduk miskin di DKI Jakarta berdasarkan batas terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Batas Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin di DKI Jakarta Tahun 1984-1990

Tahun	Batas miskin (Rp/kap/bln)	% penduduk miskin	jumlah penduduk miskin (org)
1984	15.774	11,02	809.410
1987	22.440	10,20	867.045
1990	26.746	7,79	603.255

Sumber : Rencana Umum Pembangunan Ekonomi (RUPE) DKI Jakarta 1992

Di bidang sosial budaya masalah kependudukan merupakan masalah yang memerlukan penanganan khusus. Pertumbuhan penduduk DKI Jakarta sekitar 4,62 persen per tahun dalam kurun waktu 1961-1971. Angka ini menjadi lebih kecil atau menjadi 3,97 persen pertahun dalam dekade 1971-1980 dan cenderung menurun menjadi 2,41 persen per tahun dalam dekade 1980-1990 (lihat Tabel 5). Kecenderungan penurunan pertumbuhan tersebut bukan disebabkan oleh migrasi ke kota menurun, melainkan migrasi penduduk DKI Jakarta ke daerah sekitarnya di Jawa Barat cukup berarti dalam mengurangi laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta.

Tabel 5. Penduduk DKI Jakarta

Tahun	Penduduk (org)	Pertumbuhan Per tahun (%)
1961	2.906.533	-
1971	4.546.492	4,62
1980	6.480.654	3,97
1990	8.227.746	2,41

Sumber : Rencana Umum Pembangunan Ekonomi (RUPE) DKI Jakarta 1992

Masalah belum memadainya kualitas penduduk dari segi pendidikan, kesehatan dan sebagainya menyebabkan yang seharusnya penduduk yang jumlahnya tinggi akan menjadi aset pembangunan ternyata menjadi beban pembangunan. Masalah ketertiban masyarakat memerlukan pula pemecahan yang lebih serius dan tepat. Selanjutnya masalah dalam lingkungan hidup terutama kritis lingkungan yaitu air, lahan atau pun dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan hidup.

Kota Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi menjadi impian tempat bekerja dan mengadu nasib sehingga jumlah penduduknya meningkat terus dan ada penduduk siang (tempat tinggal di luar Jakarta, tetapi bekerja di Jakarta) dan penduduk malam (memang berdomisili di Jakarta). Arus penduduk dari luar memerlukan transportasi sehingga pada siang hari terjadi kemacetan lalu lintas mengingat saat itu Jakarta mendapat tambahan penduduk siang sekitar 1,5 juta orang yang berasal dari daerah sekitarnya.

Terbatasnya lahan, banyaknya penduduk menyebabkan sulitnya menciptakan pemukiman yang nyaman.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Jakarta maka selama Pelita V kebijaksanaan Pemda mempunyai sasaran yang diarahkan pada :

- Bidang Ekonomi

- Struktur ekonomi daerah DKI Jakarta diarahkan pada pertumbuhan dan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, industri pilihan serta perbankan.
- Fungsi ekonomi daerah adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan harkat hidup masyarakat dengan tetap memperhatikan peranan daerah-daerah sekitar yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi masyarakat Jakarta.
- Pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dan hasil-hasil

- pembangunan, yakni masyarakat harus ikut serta memegang peranan aktif dalam kegiatan ekonomi.
- Guna mendukung kebijaksanaan nasional dalam mencapai struktur ekonomi seimbang, struktur ekonomi Jakarta yang terutama terletak pada sektor perdagangan, industri dan jasa serta perbankan akan tetap dikembangkan dan ditingkatkan.
 - **Bidang Agama, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Sosial Budaya**
 - Kehidupan manusia dan masyarakat harus benar-benar selaras dalam hubungannya dengan Tuhan YME, dengan sesama umat dan alam sekitarnya serta memiliki kemantapan keseimbangan dalam kehidupan lahiriah dan batiniah serta mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat gotong royong yang berkembang, sehingga sanggup serta mampu untuk melanjutkan perjuangan bangsa dalam mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan landsan ekonomi yang seimbang.
 - **Bidang Politik. Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Media Massa**
 - Dalam bidang politik perlu dimantapkan kesadaran politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bagi setiap warga masyarakat Jakarta, sehingga terjalin kelancaran usaha mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional.
 - Peningkatan pendayagunaan aparatur pemerintah diarahkan kepada usaha mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, berhasilguna dan berdaya guna.
 - Untuk meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat dalam rangka terpeliharanya tertib hukum dan kepastian hukum sebagai salah satu syarat memantapkan stabilitas nasional di daerah, maka perlu ditingkatkan langkah-langkah penyempurnaan dan pembaharuan hukum, pembinaan

aparatus penegak hukum dan memperluas usaha pembinaan kesadaran hukum pada masyarakat.

- Untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya peranan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan, maka pembangunan penerangan dan media massa perlu ditingkatkan.
- Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di daerah perlu dipelihara dan ditingkatkan, sehingga kondisi dan situasi di mana warga DKI Jakarta dapat hidup dalam satu kesatuan sosial yang tertib, tenang, aman, tentram, teratur dan serasi.
- Kebijakan Spatial
 - Pengembangan tata ruang DKI Jakarta diarahkan untuk dapat menciptakan suatu tatanan lingkungan fisik yang sehat, tertib, indah, selaras dan serasi dalam suatu kelestarian keseimbangan ekologi lingkungan, dengan memperhatikan kondisi/potensi ekonomi setempat, serta corak dan wajah budaya bangsa Indonesia.
 - Pengembangan dilakukan dengan mempertimbangkan regional sekitarnya (Jabotabek) melalui pendekatan perwilayahan pengembangan.
 - Strategi pengembangan fisik kota jangka panjang diarahkan berdasarkan pertimbangan potensi dan kendala fisik masing-masing wilayah pengembangan (WP) dengan memperhatikan dan tetap menjaga kelestarian keseimbangan alam demi kehidupan dan kelangsungan keseimbangan sumberdaya alamnya.
 - Perkembangan kota Jakarta pada tahun 2005 diarahkan :
 - Pengembangan pertumbuhan utama kota ke Barat dan ke Timur, khususnya WP Barat dan WP Timur.
 - Menunda dan mengawasi secara ketat perkembangan kota, khususnya di WP Timur Laut dan WP Barat Laut.

- Membatasi dan mengawasi secara ketat perkembangan kota khususnya di WP Selatan.

Dengan demikian penekanan prioritas pembangunan dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang ada yaitu :

1. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan penyebarannya.
2. Peningkatan kegiatan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan disiplin sosial.
4. Pengembangan prasarana dan sarana kota serta peningkatan kualitas lingkungan.

Pembangunan bidang Pertanian sebagai salah satu subsistem dari pembangunan ekonomi Jakarta masih tetap dipertahankan walaupun sumbangan terhadap PDRB DKI Jakarta cenderung menurun setiap tahunnya (lihat Tabel 6).

Tabel 6. Struktur Ekonomi DKI Jakarta Atas Dasar Harga Harga Berlaku Menurut Sektor (Dalam Persen)

Sektor Ekonomi	1980 (%)	1986 (%)	1990 (%)
Pertanian	1,44	1,40	1,05
Pertambangan dan Galian	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	18,36	24,95	26,37
Listrik, gas dan air minum	1,46	3,36	4,05
Bangunan	4,64	7,25	7,45
Perdagangan/Restoran/Hotel	27,89	21,37	20,00
Pengangkutan dan Komunikasi	8,79	9,93	10,47
Bank/Lembaga Keuangan	12,60	15,50	15,45
Sewa Rumah	4,99	3,01	2,82
Pemerintahan dan pertahanan	8,50	5,75	3,88
Jasa-jasa	11,33	7,22	8,45
Total (PDRB)	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB DKI Jakarta tahun 1990.

Permasalahan pertanian di DKI Jakarta cukup kompleks. Kemajuan yang dicapai sektor di luar pertanian (lihat Tabel 6) mengakibatkan usaha pertanian menjadi tidak efisien, karena perkembangan nilai tanah semakin tinggi, sebagai akibat pembangunan fisik untuk penyediaan kantor, industri, pemukiman, pusat pertokoan dan sebagainya. Sulitnya memperoleh lahan untuk pembangunan sarana fisik dan sarana penunjangnya menyebabkan beralih fungsinya tanah pertanian untuk keperluan tersebut. Sehingga lahan pertanian di Jakarta jumlahnya semakin berkurang yaitu sekitar 2,41 persen per tahun bila diasumsikan penurunan lahan pertanian tidak termasuk tambak dan kolam (Tabel 7).

Tabel 7. Kondisi Penyusutan Lahan Pertanian di DKI Jakarta

Jenis	Tahun 1989 (ha)	Tahun 1990 (ha)	Growth (%)
Sawah			
- Teknis	2.050	1.595	-22,19
- 1/2 teknis	1.153	1.095	- 5,03
- sederhana	587	481	-18,06
- tadah hujan	3.189	1.841	-42,27
Lahan Darat			
- pekarangan	6.021,54	7.799,34	29,52
- tegalan	6.050,27	4.197,85	-30,62
- lahan kosong	1.010,49	956,50	5,34
Kolam			
- tambak	558	552	- 1,08
- kolam	127	127	0
- minapadi	167	167	0

Sumber : Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan

Disisi lain dengan terus meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan kegiatan perdagangan dan industri, kebutuhan akan hasil pertanianpun meningkat dan di pihak lain produksi pertanian Jakarta menurun. Pada saat ini Jakarta

hanya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri sekitar 15 persen sedangkan sisanya harus disuplai oleh daerah Botabek dan daerah lainnya. Konsumsi masyarakat Jakarta perkapita pertahun adalah beras 117 kg/kapita/tahun, sayuran 33,79 kg/kapita/tahun, buah 17,29 kg/kapita/tahun, daging 9,97 kg/kapita/tahun, telur 13,47 kg/kapita/tahun serta susu 6,6 kg/kapita/tahun. Kebutuhan konsumsi penduduk terhadap berbagai kelompok komoditas dan angka produksi dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Produksi dan Konsumsi Penduduk DKI Jakarta Terhadap Berbagai Komoditas Tahun 1990

Komoditas	Produksi (kg)	Konsumsi (kg)
Beras	53.613	1.119.990.600
Sayuran	61.606	156.798.684
Buah dll	51.493	350.000.000
Daging	35.241.604	91.332.562
Telur	6.996.549	94.633.206
Susu	7.300.523	67.479.434
Ikan	28.078.700	131.785.560

Sumber : Penyusunan Pola Pengembangan Pertanian, Kanwil Dep. Pertanian 1991/1992

Berdasarkan angka konsumsi tersebut maka DKI Jakarta sangat tergantung dari pemasukan daerah lain. Dengan dipeenuhinya permintaan akan hasil pertanian dari wilayah lain maka pembangunan pertanian DKI Jakarta tidak lagi berorientasi pada peningkatan produksi tetapi lebih ditekankan pada bagaimana agar Jakarta mampu menyediakan komoditas hasil pertanian baik dalam kualitas dan kuantitas sesuai dengan

meningkatnya jumlah penduduk, daya beli masyarakat dan perkembangan kegiatan perdagangan serta mempertahankan keserasian lingkungan hidup. Penyediaan komoditi tersebut tentunya sangat berkaitan dengan kerjasama antar regional. Selain itu masalah yang dihadapi petani/peternak serta nelayan adalah permodalan. Sulitnya mendapatkan modal menyebabkan mereka belum dapat maksimal mengembangkan usahanya. Dalam hal kehutanan Jakarta yang tidak memiliki hutan produksi harus mengupayakan kelancaran lalu lintas hasil hutan baik dari segi kontinuitas persediaan maupun kualitas mengingat meningkatnya kebutuhan akan kayu yang berkualitas. Selain itu Jakarta harus mampu dalam menyediakan ternak potong baik dalam segi kualitas dan kuantitas mengingat Jakarta adalah kota internasional sehingga banyaknya permintaan dari hotel dan restoran menyebabkan kontinuitas dan kualitas harus tetap terjaga.

Dengan demikian arah kebijaksanaan pertanian di DKI Jakarta dengan melihat berbagai permasalahan di atas selama Pelita V adalah :

- Mempertahankan areal pertanian yang ada sekarang dengan mengembangkan pertanian yang maju, efisien dan tangguh melalui diversifikasi pertanian secara horizontal maupun vertikal yang pada gilirannya usaha ini dapat mendorong sektor pertanian menjadi sub sistem sektor-sektor lain yang sudah maju.
- Mengarahkan peningkatan produksi dengan memprioritaskan pada pembibitan komoditi potensial seperti hortikultura dan ikan hias.
- Menciptakan iklim yang baik bagi berkembangnya usaha agribisnis.
- Mengarahkan peningkatan produksi kepada pengembangan sentra-sentra produksi sekaligus menunjang usaha pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

- Meningkatkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tata niaga kayu, ternak di wilayah DKI Jakarta, sehingga kontinuitas penyediaan dan kualitasnya terjamin.
- Meningkatkan mutu hewan dan bibit yang baik serta menjaga sedini mungkin terjangkitnya penyakit menular terhadap ternak. Sedangkan dari segi kesmavet perlu ditingkatkan penyuluhan untuk menciptakan kesadaran masyarakat akan hasil ternak.
- Meningkatkan pengetahuan petani/peternak/nelayan dan ketrampilan aparat pertanian serta masyarakat dalam hal bidang pertanian dalam arti luas.

Arah dan kebijaksanaan tersebut dituangkan menjadi program-program yaitu :

- Program Peningkatan Produksi
- Program Pengembangan dan Pengolahan Hasil
- Program Penyuluhan dan Diklat
- Program Peredaran Lalulintas Hasil Hutan
- Program Kesmavet dan Keswan

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan program diantaranya adalah intensifikasi bibit hortikultura serta kegiatan pekarangan tanaman produktif di lahan milik masyarakat dan sekolah. Untuk mengantisipasi kerjasama regional dalam rangka pemenuhan komoditi pertanian maka pada kegiatan pembibitan telah dilakukan kerjasama dengan Botabek dimana Jakarta sebagai penyedia bibit, sedangkan Botabek sebagai tempat budidaya. Demikian pula dalam hal pembenihan ikan, Jakarta telah bekerjasama dengan Botabek dalam pengiriman benih ikan. Sesuai dengan kedudukan Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan tempat pemasaran maka telah dilaksanakan kegiatan penyusunan Sistem Informasi Agropolitan. Maksud disusunnya informasi ini untuk saling tukar menukar informasi dalam hal kebutuhan akan hasil pertanian. Sementara ini yang terlibat pada SIA baru dela-

pan daerah regional. Dalam bidang peternakan telah dirintis kerjasama dengan daerah produsen ternak potong demikian pula dalam hal perkoperasian, telah dijajaki kemungkinan untuk mempertemukan koperasi produsen dan pemasaran. Kegiatan lainnya adalah telah dilakukan temu usaha baik pertanian, peternakan maupun perikanan dan kehutanan. Untuk mengantisipasi masih kurangnya pemberian bantuan modal maka Pemda DKI diantaranya telah memberikan bantuan untuk muromi (nelayan), dan juga bagi pemotong ayam di tempat pemotongan ayam.

Kegiatan studi untuk mendapatkan masukan bagi penyusunan kebijaksanaan yang akan datang pada sektor pertanian, telah dilaksanakan dengan cara bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi diantaranya dengan Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi dan kajian para pakar maka dalam PJPT II yang akan datang disarankan strategi Pembangunan Jakarta adalah menjadi service city yang strategis dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Sedangkan hasil pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat (strategi pembangunan masyarakat) melalui peran Gubernur selaku Kepala Wilayah/Daerah yang dapat mengendalikan kegiatan pembangunan ke arah tujuan yang telah ditetapkan (Strategi Manajemen Pembangunan). Dengan adanya gambaran dimasa mendatang tersebut maka sektor pertanian di Jakarta sudah selayaknya tidak berorientasi pada lahan produksi (karena lahan sebagai faktor produksi dalam kegiatan budidaya pertanian akan tidak laik bagi pembentukan harga pasarnya), namun berorientasi pada agribisnis dan diantaranya bergeser pada aspek suplai (berkaitan dengan kerjasama regional), pemasaran (penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pemasaran, aspek pengolahan dan informasi).